

PERAN POLITIK SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TAHUN 1945-1961

Oleh: Cesilia Dea Afifah Wulandari

Sjafruddin is one figures, which are crucial for Indonesia. Sjafruddin has plural personal. Sjafruddin managing Indonesia's economy and save the country's financial. In addition, to save Indonesia Sjafruddin also established the Emergency Government of the Republic of Indonesia when Netherlands held Soekarno, Mohammad Hatta and other leader. Sjafruddin help to development Indonesia although in 1958, Sjafruddin regarded as rebellious because his relationship to the Revolutionary government of the Indonesia Republic.

Pendahuluan

Pada tahun 1945-1950, muncul kekuatan sosial politik yang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional melalui saluran diplomasi maupun perjuangan fisik. Munculnya kekuatan sosial politik, tidak lepas dari kebijakan politik etis. Dasar kebijakan politik Etis antara lain: (1) pendidikan; (2) pengairan; (3) perpindahan penduduk (Ricklefs, 2008: 328).

Para elite politik menggerakkan serta mengembangkan arus politik sebagai upaya dalam membentuk identitas politik Indonesia dan menjadi bagian dalam struktur sosial serta memiliki peranan penting dalam aktivitas politik. Posisi atau tempat seseorang dalam proses politik merupakan unsur statis yang menunjukkan peran individu dalam gerakan politik. Peranan menunjukkan pada fungsi dan penyesuaian diri.

Salah satu tokoh politik etis yang berperan penting di masa revolusi Indonesia ialah Sjafruddin Prawiranegara. Peran Sjafruddin Prawiranegara sudah ditunjukan sejak Ia menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Kediri tahun 1942. Kemudian pada kabinet Sjahrir ke-2 sebagai Menteri Muda Keuangan dan mewujudkan "Oeang Republik Indonesia" (ORI) (Aji Rosidi, 2011: 113). Membentuk Pemerintahan Darurat (PDRI) di Bukit Tinggi (Moedjanto, 1988: 42). Pada Februari 1958 menjadi tokoh sentral pendiri Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang

dibentuk atas ketidak setujuan terhadap pembentukan kabinet Djuanda. Di masa Orde Baru, Sjafruddin Prawiranegara merupakan salah satu individu yang menandatangani petisi 50 sebagai wujud kritik atas pemerintahan Soeharto. Berdasarkan realitas Sjafruddin merupakan salah satu tokoh yang memberikan sumbangan dalam pembentukan Republik Indonesia melalui peran politiknya.

Kehidupan Sosial Politik

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Anyar Kidul, Banten 28 Februari 1911. Sjafruddin Prawiranegara merupakan putra dari Raden Arsjad Prawiraatmadja dan Noer'aini. Raden Arsjad Prawiraatmadja merupakan asisten Wedana (camat) di Anyar Kidul, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten. Sedangkan ibunya, Noer'aini, merupakan puteri Mas Abidin Mangoendiwirja camat di Cening, Kawedanan Kubangkondang, kabupaten Pandeglang, Karesidenan Banten (Kahin, 1989: 101).

Raden Arsjad menghendaki pendidikan barat bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, Sjafruddin kemudian masuk ELS (Europeesche Lagere School). Dilanjutkan masuk MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), kemudian AMS (Algemeene Middlebare School), dan RHS (Rechts Hoge School). Di samping menghendaki edukasi barat, Raden Arsjad juga menginginkan Al-Qur'an serta pelaksanaan semua kewajiban dan aturan Islam dilakukan anak-anaknya.

Sehari-hari, Raden Arsjad memakai pakaian Barat, walaupun ia tergabung sebagai anggota Sarekat Islam. Kombinasi budaya dan gaya hidup yang dimiliki Raden Arsjad menyebabkan dirinya diterima secara baik di kalangan santri dan abangan. Semua perilaku Raden Arsjad tersebut diacu Sjafruddin sebagai pedoman bergaul dengan berbagai kalangan baik santri modernis maupun kaum sosialis sekuler (Rahardjo, 2011:69).

Sjafruddin ketika menjadi mahasiswa RHS, aktif dalam organisasi mahasiswa yang disebut USI (Unitas Studiosorum Indonesiensis). USI

dalam aktivitasnya dibatasi hanya pada bidang rekreasi dan kegiatan yang menunjang studi dan tidak ikut campur dalam politik. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain diskusi, olahraga, membaca, dan darmawisata (Rosidi, 2011: 79-80). Komunitas USI dibentuk para Profesor konservatif Belanda untuk menekan kecenderungan radikal kelompok pemuda dan mahasiswa yang mengusung nasionalisme. Anggota USI merupakan mahasiswa dan mahasiswi dengan pendidikan Belanda dan berasal dari keluarga pribumi yang cukup. USI mempunyai lagu mars yang ditulis dalam Liedboek (Mrazek, 2006: 210-211).

Sjafruddin menaruh perhatian pada pergerakan nasional. Melalui surat kabar, majalah dan buku, serta melalui kuliah di RHS, Sjafruddin memahami dan mengamati soal-soal kemasyarakatan, termasuk kegiatan pergerakan nasional. Sjafruddin termasuk golongan kooperatif, dan menganggap perjuangan kemerdekaan Indonesia harus ditempuh melalui kerjasama dengan pihak Belanda (Prawiranegara, 1972: 319).

Belanda tidak mau kompromi pada masa akhir pemerintahan dan enggan memberi kesempatan bangsa Indonesia untuk merdeka. Selain itu, rakyat juga menderita di bawah penjajahan Jepang. Hal itu membuat Sjafruddin sadar, bangsa Indonesia harus berjuang untuk merdeka. Sjafruddin kemudian mengadakan diskusi dengan kelompok Pagoejoeban Pasoendan dengan tokohnya Oto Iskandar Dinata dan Ir. Oekar Bratakoesoemah, kelompok Parindra dengan tokohnya Gondokusumo dan Dr. Erwin, kelompok Islam dengan tokohnya Arudji Kartawinata dan M. Natsir. Sjafruddin menjalin hubungan dengan kolega semasa mahasiswa di USI dulu seperti Subandio Sastrosatomo, Koesoema Soetojo, Mr. Ismael Thajeb, dan Ali Budiardjo. Melalui mereka, Sjafruddin mengadakan kontak dengan gerakan bawah tanah yang dipimpin sutan Sjahrir di Jakarta (Rosidi, 2011: 91-93).

Sjafruddin menyatakan revolusi Indonesia mempunyai tujuan untuk menghapus sistem penjajahan dan menyatukan bangsa Indonesia. Tujuan revolusi Indonesia yakni keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Sistem yang diperlukan tentunya ialah sistem masyarakat, susunan politik dan ekonomi yang menjamin terlaksananya keadilan sosial serta memberi kemakmuran bagi rakyat yang tidak dapat dicapai pada masa lampau karena adanya kolonial-kapitalisme Belanda. Sjafruddin menilai paham yang cocok dijadikan pedoman revolusi nasional ialah “sosialis religius”. Dasar sosialisme itu disandarkan pada kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Bagi sosialis religius, sosialisasi atau nasionalisasi dari berbagai alat produksi masyarakat, bukan tujuan akhir, melainkan suatu alat atau cara mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Sosialisasi perlu dilaksanakan serta harus dihubungkan dengan kondisi dan situasi (Noer, 2000: 143).

Kahin menganggap uraian Sjafruddin tentang gagasan sosialis religius sangat realistis, terus terang dan penting. Sjafruddin juga disebutkan sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh. Gagasan yang dicetuskannya menjadi orientasi bagi Partai Masjumi, partai tempatnya bernaung semakin berpengaruh pada waktu itu (Kahin, 1989: 102). Pemikiran Sjafruddin memberikan gambaran ideologi dan kebijakan serta asas bagi Masjumi (Noer, 2000: 147).

Peran di Masa Revolusi

Sjafruddin menjadi Menteri Keuangan pada kabinet Sjahrir III Oktober 1946 (Raliby, 1953:419). Kesediaan Sjafruddin menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III karena ingin mewujudkan “Oeang Republik Indonesia” (ORI). Sjafruddin yakin ORI dapat menjadi alat untuk mencerminkan eksistensi negara Republik Indonesia. Selain itu juga dapat difungsikan untuk membiayai perjuangan seperti menggaji pegawai negeri, tentara, membeli perlengkapan administrasi pemerintah dan lain-lain. Keluarnya ORI merupakan tindakan perdana untuk mencapai peningkatan ekonomi (Rosidi, 2011: 127-137).

Sjafruddin didampingi Oekar Bratakoesoemah menemui Mohamad Hatta dan menyampaikan tentang pembuatan uang Republik.

Mohamad Hatta saat itu khawatir produksi uang Republik dapat memicu penuduhan pemalsuan oleh dunia internasional. Sjafruddin kemudian meyakinkan Mohammad Hatta, uang baru mutlak diproduksi sebagai salah satu atribut kemerdekaan (Prawiranegara, 1972: 323).

Pada tanggal 29 Oktober 1946 malam, sebelum keluarnya ORI, Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan pidato melalui RRI. Isi pidato tersebut antara lain menghimbau rakyat untuk berhemat dengan tidak menutup menutup toko dan membatasi pembelian (Prawiranegara, 2011: 32).

Pada tanggal 30 Oktober 1946 ORI dikeluarkan secara resmi sebagai alat penukaran, alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah *de facto* Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura dan Sumatra (*Sikap*, 12 Maret 1949). Kurs ditentukan 10 rupiah ORI sama dengan emas murni 5 gram 24 karat. Untuk penukaran 50 dan uang Jepang dihargai dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Jawa dan Madura, serta 100 rupiah uang Jepang nilainya sama dengan 1 rupiah ORI untuk wilayah Sumatera (Arsip Kementerian Penerangan no 1).

ORI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan simbol persatuan Indonesia. Dengan kata lain ORI juga merupakan alat perjuangan kemerdekaan untuk membiayai berbagai macam keperluan negara. ORI juga difungsikan sebagai alat revolusi yang guna mendukung administrasi, organisasi dan digunakan untuk mengurus kesejahteraan rakyat (Beng To, 1991: 69-84).

Pada 29 Januari 1948 Sjafruddin Prawiranegara menjadi Menteri Kemakmuran dalam kabinet Hatta (Kahin, 1995: 292-293). Sebagai Menteri Kemakmuran, Sjafruddin ditugaskan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perekonomian (Poespaonagoro & Notosusanto, 1993: 151).

Pada awal tahun 1948 keadaan ekonomi di daerah Republik Indonesia buruk. Agresi Militer Belanda mengakibatkan berbagai daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti perkebunan, kawasan industri

dan pelabuhan jatuh ketangan Belanda. Hal itu juga berujung pada lumpuhnya perdagangan dan sulitnya pemasukan uang kas negara (Ricklefs, 2008:338-339). Di sisi lain, Belanda mencetak dan mengedarkan ORI palsu sehingga mengalami inflasi. ORI waktu itu mudah dipalsu. Kekurangan belum dapat diatasi. Oleh karena itu, Belanda dengan mudah mencetak uang palsu dan mengedarkannya secara bebas (*Sikap*, 24 Maret 1949).

Sjafruddin Prawiranegara menghadapi situasi tersebut, segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1948 tanggal 22 Maret 1948 tentang pengumpulan bahan makanan rakyat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga persediaan bahan makanan yang cenderung menipis. Pada 9 Juli 1948 Sjafruddin juga menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 15 untuk penghitungan ternak seperti kuda, kerbau, kambing, domba dan sapi. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengetahui data statistik guna dijadikan dasar rencana pekerjaan dalam pembangunan. Sjafruddin juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang penting seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula, minyak tanah, jagung, gapek, tapioka, garam, kopi dan teh. Peraturan ini ditetapkan guna meminimalisir penimbunan bahan makanan penting supaya peredaran barang-barang tersebut berjalan lancar (Rosidi, 2011: 163).

Program lain Kementerian Kemakmuran ialah memberikan kepada rakyat kesempatan untuk mandiri. Hal itu dilakukan dengan melakukan pencetakan berbagai buku tentang pembuatan barang keperluan hidup sehari-hari, seperti sabun, gelas, sikat gigi dan sebagainya. Selin itu mengadakan program transmigrasi besar-besaran ke Sumatera, penggalian waduk dan perbaikan irigasi serta pembesaran produksi (Arsip Kementerian Penerangan No 216).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang lapangan terbang Maguwo. Pada suasana itu, kabinet RI mengadakan sidang kilat

istimewa di Istana Negara Yogyakarta (Moehadi, 1981:17). Salah satu keputusan penting dalam sidang yaitu memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu di Bukit tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Keputusan lain ialah memberikan mandat kepada dr. Sudarsono, L. N. Palar, dan A. A. Maramis di New Delhi (India) untuk membentuk pemerintahan di luar negeri jika Sjafruddin tidak berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (Rasjid, 1982: 19-21). Keputusan itu dicetuskan karena Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta tidak mungkin untuk diteruskan (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No 14).

PDRI yang dibentuk di Sumatra dengan susunan sebagai berikut. Mr. Sjafruddin prawiranegara sebagai ketua, menteri Pertahanan dan Penerangan. Menteri luar negeri Mr. AA. Maramis, sebagai Menteri Dalam Negeri dan Kesehatan dr. Sukiman. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. Menteri Kemakmuran I. Kasimo dan sebagai Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo. Menteri Agama Maskur. Mr. Teuku Mohamad Hasan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Ir. Indradjaja sebagai Menteri Perhubungan. Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerdjaan Umum. Mr. St. Moh Rasjid sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial. Supeno sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda (Arsip M. Rasjid no.44).

Sehari setelah PDRI didirikan, Sjafruddin Prawiranegara selaku Ketua PDRI menyampaikan pidato radio yang ditransmisikan kepada semua stasiun radio. Isi pidato itu ialah "Belanda berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri dan beberapa pembesar lain dan mengira dengan ditawannya pemimpin tertinggi, menyebabkan aparaturnya putus asa. Negara Republik Indonesia tidak hanya Soekarno-Hatta, sekalipun keduanya merupakan pemimpin. Hilangnya Soekarno-Hatta, sementara atau selamanya, rakyat Indonesia tetap menghadirkan pemerintahan baru". Kepada seluruh angkatan perang Republik Indonesia Sjafruddin juga menyerukan pertempuran di tiap

tempat dengan berbagai cara untuk membasmi Belanda (Imran, Djamhari, dan Chaniago, 2003: 86-87).

Pada tanggal 10 Juli 1949, Sjafruddin kembali ke Yogyakarta dan disambut Soekarno. Sjafruddin mengembalikan mandat PDRI kepada dan menyatakan berakhirnya PDRI setiba di Yogyakarta. Sjafruddi juga sempat menyatakan selama ini PDRI tidak berada di belakang Roem-Royen, tapi ada di belakang rakyat guna kepentingan rakyat (*Kedaulatan Rakyat*, 11 Juli 1949).

Pada 13 Juli 1949 diadakan sidang Kabinet Hatta guna transformasi kabinet menjadi Kabinet Hatta II. Pada kesempatan itu Sjafruddin dipilih sebagai Wakil Perdana Menteri (Noer, 2000: 207). Saat itu, Sjafruddin menegaskan mandat yang dikirim oleh Soekarno dan Hatta kepadanya tidak pernah diterima. Sjafruddin dan tokoh lain di Sumatera membentuk PDRI berdasarkan ilham untuk mengisi kevakuman pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari sidang tersebut diadakan dua Konferensi. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Jogja, yang dihadiri Sjafruddin. Dilanjutkan 30 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi berhasil mencapai persetujuan dan membentuk Panitia Persiapan Nasional yang siap menjaga ketertiban sebelum dan sesudah KMB (Imran, Djamhari, dan Chaniago, 2003: 272-289).

Sebagai Menteri Keuangan

Sjafruddin ketika menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Republik Indonesia Serikat menghadapi berbagai kesulitan seperti banyak beredarnya varian uang dalam masyarakat dan menyebabkan inflasi. Neraca perdagangan tiap tahun mengalami defisit. Akibatnya, cadangan devisa dan emas di bank menyusut. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia Serikat juga menerima beban utang pemerintah Hindia Belanda, baik utang dalam maupun luar negeri (Beng To, 1991:116).

Guna mengatasi hal di atas pada 19 Maret 1950 Sjafruddin mengeluarkan keputusan “Operasi Gunting Sjafruddin”, yaitu memotong dua dengan gunting uang merah *de Javasche Bank* pecahan Rp 5 ke atas. Pecahan Rp 2,50 dan di bawahnya tidak digunting. Uang ORI juga tidak digunting. Keputusan ini untuk menekan inflasi dan berujung penurunan harga barang (Beng To, 1991: 209).

Sejak pukul 8 malam 19 Maret 1950, uang kertas pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nominalnya, tapi mulai 22 Maret 1950 bagian kiri harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat lain yang ditentukan. Batas akhir penukaran ialah 16 April 1950, jika belum ditukarkan bagian kiri itu tidak laku. Sedangkan bagian kanan dari uang itu dinyatakan tidak laku, tetapi dapat ditukar dengan surat obligasi pemerintah sebesar setengah dari nilai nominalnya. Obligasi itu dinamakan Obligasi Pinjaman Darurat 1950. Bunganya sebesar 3% setahun (Rosidi, 2011: 250-251).

Hal ini juga dilakukan juga terhadap pada simpanan bank dan surat perbendaharaan. Simpanan pada bank ialah simpanan pihak ketiga yang dapat ditagih sewaktu-waktu maupun dengan tempo yang sudah ditentukan, serta segala simpanan yang dipandang oleh atau atas nama Menteri Keuangan. Bank diwajibkan memindahkan setengah dari simpanan itu kepada sebuah rekening khusus yang dinamakan “Pendaftaran Pinjaman Negara 3% 1950” yang hanya dapat digunakan untuk membeli obligasi negara. Langkah pembersihan uang pada bulan Maret 1950 berhasil mengurangi jumlah uang kartal sekitar 1,6 milyar, sehingga posisi uang yang beredar dapat ditekan menjadi sebesar 4,3 milyar pada akhir tahun 1950 (Parera,ed., 2005: 96-97).

Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan juga mengatur penukaran uang ORI dan jenis-jenis uang lain. Untuk dapat menukarkan ORI orang harus mempunyai surat keterangan dari lurah atau pamong praja yang sederajat. Untuk anggota Angkatan Perang sebagai pengganti lurah dapat

menggunakan surat keterangan dari Komandan yang bersangkutan. Semua hanya boleh menukar satu kali dan transaksinya diawasi pamong praja dan polisi sebagai pemeriksa uang palsu (*Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 1950).

Peraturan yang dikeluarkan Sjafruddin setidaknya menyebabkan beberapa hal seperti menurunkan harga barang. Mengurangi kekacauan dalam soal uang dan memperlancar perekonomian. Melenyapkan uang federal. Menumbuhkan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia dan memungkinkan untuk mendapatkan kredit. Terakhir mengokohkan kedudukan politik Indonesia (Prawiranegara, 2011: 40-41).

Sebagai Gubernur Bank

Pada 12 Juli 1951 Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Presiden De Javasche Bank. Pada 2 Juni 1953, dicetuskan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) tahun 1953 no.11 dan berujung pada 1 Juli 1953 dengan didirikannya Bank Indonesia. Sjafruddin menjadi Gubernur Pertama Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kedudukan Bank Indonesia adalah menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Sjafruddin sejak awal aktif membantu penyusunan rencana Undang-undang Pokok tentang Bank Indonesia. Banyak gagasannya yang diterima dan masuk dalam undang-undang, misalnya tentang adanya suatu Dewan Moneter yang unik dan bersifat khas Indonesia. Dewan Moneter terdiri dari tiga orang, yaitu Menteri Keuangan sebagai Ketua, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia (Parera,ed., 2005: 38-44).

Terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Pada tanggal 10 Februari 1958 Dewan Perjuangan mengumumkan mukadimah piagam perjuangan untuk bangkit berjuang menyelamatkan Republik Indonesia dari malapetaka dan mengajukan tuntutan supaya dalam waktu 5x24 Kabinet Djaunda mengembalikan

mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No.3). Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Dewan Perjuangan menyatakan bebas dari kewajiban mematuhi Dr. Ir. Suakrno sebagai Kepala Negara (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No.4).

Pada 15 Februari 1958, Dewan Perjuangan memutuskan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) karena tidak adanya tanggapan dari pemerintah. Keputusan Dewan Perjuangan tentang pembentukan Dewan PRRI itu hanya ditandatangani Ketua Dewan Perjuangan yaitu Letnan Kolonel Ahmad Husein. Sjafruddin diminta untuk tanda tangan di atas dokumen itu namun menolak. Sjafruddin melakukannya supaya semua pihak tahu, penanggung jawab pembentukan PRRI itu adalah Ketua Dewan Perjuangan/Ketua Dewan Banteng Kolonel Ahmad Husein. Walaupun demikian, Sjafruddin tetap memimpin PRRI dan menjalankan tugas dengan baik (Rosidi, 2011: 335).

Sebagai Perdana Menteri yang baru dilantik, Sjafruddin menyampaikan sebuah pidato radio yang menjelaskan visai dan misi pembentukan PRRI, yaitu untuk membela kebenaran dan keadilan (Moedjanto, 1988: 106). PRRI merupakan suatu pergerakan sebagai bentuk protes atas pemerintahan Republik Indonesia, bukan bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno pada waktu itu. Meskipun demikian pada prakteknya PRRI dianggap sebagai pergerakan yang dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan Republik Indonesia (Gusman, 2007: 33-35).

Dewan Perjuangan memutuskan untuk mentransformasikan Indonesia sebagai Republik Persatuan Indonesia (RPI). Ketika Republik Persatuan Indonesia diproklamkan pada 8 Februari 1960, Sjafruddin dipilih sebagai presiden pertama (Arsip Sjafruddin Prawiranegara no. 10). Dalam pidato ulang tahun RPI Sjafruddin menyampaikan 5 Azas Pokok UUD RPI yaitu mempersatukan suku bangsa diseluruh Indonesia merupakan berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintahan diatur dan diselenggarakan dengan cara musyawarah atau

demokrasi. Menjunjung hak atau kebebasan menentukan nasib. Perasaan solidaritas dengan seluruh bangsa di dunia. Perlindungan kepada yang lemah dan miskin (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No 12).

Presiden Soekarno menetapkan dan mengundang Keppres no. 449/1961 memutuskan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada individu yang dianggap memberontak. Hal itu ditanggapi Sjafruddin pada 17 Agustus 1961 dengan mengeluarkan instruksi kepada seluruh awak RPI untuk menghentikan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia (Arsip Sjafruddin Prawiranegara No.6). Kemudian Sjafruddin juga menyerahkan seluruh harta kekayaan RPI kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai kekayaan negara.

Meskipun sudah menyerah dan menerima abolisi Sjafruddin dan teman-temannya mengalami karantina politik PRRI/RPI. Pada awal tahun 1962, Sjafruddin dan teman-temannya dibawa dari Padang Sidempuan ke Jakarta, selanjutnya dibawa ke Cipayung, Bogor. Di sana mereka ditampung di beberapa rumah. Mereka dibiarkan bebas bergerak, tapi tidak diperkenankan meninggalkan kota kecil itu tanpa izin (Rosidi, 2011: 227-345).

Kesimpulan

Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten 28 Februari 1911. Ayahnya, seorang birokrat dan agamis, sementara ibunya berdarah Minang. Sjafruddin dididik dalam lingkungan sekolah Belanda dan hanya mendapatkan pendidikan agama secara informal dari lingkungan keluarga dan kampungnya. Kehidupan Ayahnya sebagai priyayi yang taat pada ajaran agama Islam, menjadi pedoman yang membuat Sjafruddin bisa bergaul dengan kalangan santri modernis dan kaum sosialis sekuler, selalu berlandaskan pada ajaran agama Islam saat mengambil keputusan, dan berani melawan arus dalam memutuskan kebijakan. Sjafruddin menjadi anggota Masyumi tahun 1945 setelah diikeluarkannya maklumat

Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang mengharuskan setiap anggota KNIP untuk memilih dan masuk kedalam salah satu partai. Peran Politik Sjafruddin bagi Indonesia tahun 1945-1961 yaitu diawali dengan dipilihnya Sjafruddin menjadi salah satu anggota Badan Pekerja KNIP tahun 1945. Menjadi Menteri Keuangan Kabinet Sjahrir III dengan kebijakan mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran memperbaiki ekonomi Indonesia. Sjafruddin menjadi Ketua PDRI pada tahun 1948. Sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta tahun 1949, dengan mengeluarkan kebijakan penting yaitu "Operasi Gunting Sjafruddin". Pada tahun 1951 Sjafruddin Prawiranegara terpilih menjadi *Gubernur De Javasche Bank*, dan pada 1953 Sjafruddin menjadi Gubernur Pertama Bank Indonesia. Pada tanggal 15 Februari 1958, Dewan Perjuangan memutuskan Sjafruddin menjadi Perdana Menteri Pemerintah Revolusioner republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Arsip Sjafruddin Prawiranegara No 3. Mukadimah Piagam Perjuangan, Padang 1 Februari 1958.

Arsip Sjafruddin Prawiranegara No.4. Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara, Padang, 10 Februari 1958.

Arsip Sjafruddin Prewiranegara No.6. Penyerahan Diri Sjafruddin. Sumatera, 28 Agustus 1961.

Arsip Sjafruddin Prawiranegara No. 12. Pidato Presiden RPI Pada Hari Proklamasi 8-2-1960.

Arsip Sjafruddin Prawiranegara No 14. Panitia Lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, 17 November 1969.

Arsip Kementerian Penerangan No. 1. Undang Undang No 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia dan Penjelasan.

Arsip Kementerian Penerangan No 216. 23 Februari 1948. Laporan Interview W. Bosshard dengan Mr. Sjafruddin.

Arsip M. Rasjid No. 44, Tanggal 14 Maret 1949. Tantang balasan surat I.J Kasimo oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Ajip Rosidi. 2011. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada ALLAH SWT*. Jakarta: PT Pustaka Jaya.

Amrin Imran, Saleh A. Djahhari, dan J. R. Chaniago. 2003. *PDRl (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan. Perhimpunan Kekerabatan Nusantara.

Dawam Rahardjo, M. 2011. *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius: Pragmatisme Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*. Jakarta: Mizan Publika

Deliar Noer. 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Bandung: Mizan.

Kahin, G. M. T. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

Kahin, George McT. 1989. "In Memoriam: Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989)". Indonesia Cornel Southeast Asia Program. no. 48 (October).

Marwati Djoened Poespaonagoro, dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta : Balai Pustaka.

Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.

Moehadi. 1981. *Riwayat Singkat Pembentukan Pemeritan Darurat Republik Indonesia*. Semarang: CV. Aneka.

Mohammad Rasjid. 1982. *Di Sekitar PDRl (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mrazek, Rudolf. 2006. *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony*. Terj. Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Oey Beng To. 1991. *SejarahKebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: LPPI.

Osman Raliby. 1953. *Documenta Historica: Sejarah Dokumenter dari pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Parera, J. D. (ed). 2005. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959: Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Unit Khusus Museum Bank.
- Ricklefs, M. C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Sjafruddin Prawiranegara. 1972. *Bung Hatta Demokrat Sedjati dan Pemimpin Bangsa jang Saja Hormati*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70.
- _____. 2011. *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Irman Gusman. 2011. "National Development as the Form of Totality in Local Development: Drawing Meanings form Regional Turbulence Caused by PRRI (Revolutionary Government of the Republic of Indonesia) and Permesta (Charter of the Struggle of the Universe)". *Journal Bhinneka Tunggal Ika Scientific review on Politic, Regional Autonomy, Natural Resources, and Pluralism*. Volume 2 no. 1.
- Kedaulatan Rakyat*, 11 Juli 1949 no 10 tahun V. P. M. Safrudin Tiba di Jogja.
- Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 1950 no 72 tahun VI. Tentang Penukaran Uang URI.
- Sikap*. Dua Tahun Uang Republik Indonesia. 24 Maret 1949.